

ABSTRAK

Erwin Firman Abadi

1810111098

Penelitian ini menjelaskan bahwa Penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai serta pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat seperti jalan sangatlah penting bagi roda perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta segenap komponen masyarakat telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terjadi di Jalan Jend. S. Parman sampai dengan Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Di area tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan tidak menutup kemungkinan bahwa kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh instansi pemerintah membuat para pegawai yang memarkir kendaraannya di sekitar jalan tersebut tersebut dan kerap menimbulkan kemacetan. Area tersebut juga tidak terdapat marka parkir seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir. Maka Alih fungsi ruang manfaat bahu jalan adalah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan uraian tersebut diatas alih fungsi bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Lumajang sendiri sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir. Dimana apabila melakukan pemanfaatan ruang milik jalan perlu adanya pemberian rambu lalu lintas atau rambu parkir dan/atau marka jalan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pemberian rambu atau marka jalan untuk parkir di Jalan Jend. S. Parman sampai dengan Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang tidak ada kesesuaian dengan yang telah di uraikan dalam Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir tersebut. Tidak adanya rambu atau marka jalan di area tersebut menimbulkan kemacetan.

Kata Kunci: Alih fungsi, bahu, jalan, Lumajang

ABSTRACT

Erwin Firman Abadi

1810111098

This research explains that the provision of adequate public service facilities and the use of economic resources for people's welfare, such as roads, are very important for the community's economy. Road infrastructure is one of the main pillars for public welfare and as basic infrastructure in public services and utilization of economic resources as part of the national transportation system through a regional development approach to achieve connectivity between activity centers, balance and equitable development between regions, improving the central and regional economies in national economic unity. Currently, the administration and development carried out by the Lumajang Regency Government and all components of society have made efforts to improve and equalize community welfare. As happened on Jalan Jend. S. Parman to Jalan Alun-Alun Utara Lumajang Regency. In this area there are several government agencies and it is possible that the lack of parking space provided by government agencies means that employees park their vehicles around the road and this often causes traffic jams. There are also no parking markings in this area as stated in Lumajang Regency Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Parking Fees. So the transfer of the useful space for the road shoulder is the authority of the Lumajang Regency Government. Based on the description above, the transfer of the function of the road shoulder as a parking area in Lumajang Regency itself has regulations that regulate it, namely Regional Regulation Number Lumajang Regency Number 9 of 2011 concerning Levy for Parking Operations. Where when utilizing road space it is necessary to provide traffic signs or parking signs and/or road markings.

The conclusion of this research is that in providing signs or road markings for parking on Jalan Jend. S. Parman up to Jalan Alun-Alun Utara Lumajang Regency does not comply with what has been described in Regional Regulation Number Lumajang Regency Number 9 of 2011 concerning Retribution for Parking Management. The absence of road signs or markings in the area causes traffic jams.

Keywords: *Function transfer, shoulder, road, Lumajang*